

DAFTAR ISI

Catatan Redaksi.....	iii
• <i>Cyberpolitics</i> sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber oleh: Jerry Indrawan.....	1-15
• Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik oleh: Efriza	17-38
• Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia oleh: Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo.....	39-55
• Analisis Diplomasi <i>Soft Power Denmark</i> Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia) oleh: Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro	57-75
• Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional oleh: Aji Widiatmaja, Ulul Albab	77-93

CATATAN REDAKSI

Jurnal *Politica* Vol 10 No 1 Mei 2019 menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu-isu strategis Indonesia, baik di bidang politik dalam negeri maupun hubungan internasional, baik hasil kajian maupun penelitian.

Artikel pertama berjudul “*Cyberpolitics* sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber” di tulis oleh Jerry Indrawan. Artikel ini membahas tentang penggunaan pendekatan milenial sebagai sarana kampanye yang dicirikan dengan digunakannya media fisik yang diberi nama siber (*Cyber*). Melalui pendekatan ini, terminologi politik mengalami fusi dengan ruang siber sehingga memunculkan istilah baru yang diistilahkan dengan “*cyberpolitics*”. *Cyberpolitics* adalah sebuah terminologi yang dimunculkan untuk merespons adanya interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan terjadi hanya melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan. Secara sederhana, *cyberpolitics* diartikan sebagai politik baru di era milenial yang mengombinasikan ilmu politik dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, memahami *cyberpolitics* lebih dalam membutuhkan perspektif inter-disipliner sehingga ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Karenanya, *cyberpolitics* sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Artikel kedua ditulis oleh Efriza dengan judul “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”. Di dalam analisisnya, penulis berpendapat bahwa lanskap politik suatu negara demokratis adalah partai politik. Karena itu, di negara demokratis seperti Indonesia, partai politik menjadi tulang punggung berjalannya demokrasi dalam berbagai proses politik, baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Meskipun partai politik mempunyai posisi penting di era reformasi, namun permasalahan justru banyak ditemukan di partai-partai politik. Artikel ini menemukan fakta bahwa persepsi publik terhadap kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk. Partai politik dianggap bertanggung jawab terhadap buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik.

Artikel ketiga berjudul “*Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation Between West Java, Indonesia And South Australia*” ditulis oleh Andriani Florencia Dharmajaya dan Anggara Raharyo. Kedua penulis menjelaskan jika kerja sama antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Analisis tulisan ini berfokus pada praktik paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Dengan memanfaatkan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama, kedua penulis berpendapat bahwa kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal, walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.

Artikel keempat berjudul “Analisis Diplomasi *Soft Power Denmark* Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)” yang ditulis oleh Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, dan Andriyansyah Perdana Murtyantoro. Artikel ini ingin memperlihatkan bahwa pemanasan global merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga menyumbang

terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran terhadap dampak eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan mengakibatkan meningkatnya suhu bumi sehingga membahayakan kehidupan manusia untuk jangka panjang mengingat permukaan air laut yang meningkat akan sangat membahayakan kehidupan manusia yang berada di sekitar pantai. Di samping itu, banyak negara yang terancam tenggelam bila air laut dibiarkan terus meningkat tanpa terkendali. Denmark termasuk negara yang sangat menaruh perhatian terhadap isu pemanasan global. Salah satu langkah yang diambil adalah menggalang kerja sama dengan negara-negara yang telah melakukan kontribusi untuk memperlambat fase pemanasan global. Indonesia dianggap sebagai negara yang telah berupaya menurunkan tingkat emisi karbon. Analisis dalam tulisan ini termasuk terfokus pada kerja sama Denmark dan Indonesia dalam mengatasi masalah lingkungan, dan tindakan apa yang dilakukan pemerintah Denmark untuk mengurangi tingkat polusi di Indonesia.

Artikel kelima dalam jurnal ini ditulis oleh Aji Widiatmaja dan Ulul Albab dengan judul “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional”. Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan corak kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics*. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada kepentingan nasional. Penulis memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri dengan menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Penggabungan itu penting dilakukan agar tercapai kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*). Secara konkret upaya penggabungan itu dicontohkan seperti mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menjaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespons perubahan lingkungan strategis.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar dan masukan terhadap semua artikel yang masuk untuk penerbitan Jurnal Politica Vol 10 No 1 Mei 2019. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi editor yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya penerbitan jurnal ini. Kami mengharapkan terbitnya Jurnal Politica Vol 10 No 1 Mei 2019 dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan diskusi maupun penelitian mengenai isu-isu bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2019
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Jerry Indrawan

Cyberpolitics as A New Perspective In Understanding Politics in The Cyber Era

Political science studies have developed from conventional perspectives, marked by the use of physical means of campaign, to the era of non-conventional politics, where the use of cyber medium is more prevalent. The use of cyber medium in the study of political science has resulted in many sectors, from democracy, security, defense, social and cultural affairs, education, to political campaigns to conducted through the cyber medium. Cyberpolitics is a new concept that is very interesting to discuss, as interesting as it is to be studied in detail. Cyberpolitics will be the future of political campaign for all political stakeholders, especially those running in political contests. Political activism has already been replaced by a form of virtual communication. Cyberpolitics can in this regard help democracy work as it should. The aim of this research is to understand cyberpolitics more deeply, and that requires an interdisciplinary perspective, not just political science. The significance of this research is to provide a different perspective to the public about the development of political science, which now moves towards the use of cyber technology. This paper will discuss the study of cyberpolitics, which is seen as a new perspective in understanding politics in the cyber era. The author recommends that studies discussing the concept of cyberpolitics be discussed and researched more intensively among political science scholars, so that the combination of political science and information technology in the future can mutually enrich the scientific understanding of both disciplines.

Keywords: Cyberpolitics; Politics in Cyber Era; Cyber Security and Defense.

Jerry Indrawan

Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber

Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. *Cyberpolitics* menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. *Cyberpolitics* akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap *stakeholder* politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. *Cyberpolitics* dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami *cyberpolitics* secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif interdisipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian *cyberpolitics*, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep *cyberpolitics* mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Kata Kunci: *Cyberpolitics*; Politik di Era Siber; Keamanan dan Pertahanan Siber.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Efriza

The Existence Of The Political Parties In Public Perception

A democratic country needs political parties. They become the driving force in the implementation of democracy in Indonesia considering the important role that they play in various political processes in the legislature, government, and other state institutions. Given the importance of political parties in Indonesia in the Reform era, it turns out that most problems come from political parties. This paper aims to gain an understanding of the development and role of political parties in the Reform era based on the public perception of the existence of political parties. Based on the objective of the study, the significance of this study can hopefully be elicited, which is to provide an understanding and an input on the development and role of political parties in the Reform era. Results of the study suggests that public perception of the performance of political parties as political infrastructure was still poor and that political parties were also responsible for the poor performance of the political superstructure institutions. Therefore, the researcher recommends that political parties internally need to strengthen party institutionalization, while on the other hand, there needs to be an effort to simplify party systems in Indonesia.

Keywords: Political Parties; Democracy; Reform; Public Perception.

Efriza

Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik; Demokrasi; Reformasi; Persepsi Publik.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo

Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia

Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as para-diplomacy, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java's side.

Keywords: Para-diplomacy; West Java; South Australia; Indonesia – Australia; Sister Province.

Andriani Florencia Dharmajaya, Anggara Raharyo

Desentralisasi Kerja Sama Luar Negeri: Studi Kasus Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan Australia Selatan

Kerja sama antar Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi telah menjadi salah satu perhatian di studi Hubungan Internasional. Mayoritas peneliti menamakan hal ini sebagai aktivitas paradiplomasi yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh aktor sub-nasional untuk mendapatkan manfaat atau mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini berfokus pada praktik paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dari kerja sama provinsi yang telah dilaksanakan dari pembaharuan perjanjian kerja sama pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari kedua belah pihak sebagai sumber utama. Dari analisis ini, kerja sama dalam bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata serta kebudayaan dan pendidikan masih dalam tahap perkembangan awal. Walaupun, beberapa sektor telah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama bagi Jawa Barat.

Kata Kunci: Paradiplomasi; Jawa Barat; Australia Selatan; Indonesia – Australia; Sister Province.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro

An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia

(A Study on Environmental Management Cooperation in Indonesia)

Global warming is one of the key issues of the century. The cause of this particular phenomenon is that most economic activities have been carried out by many countries without due consideration of sustainability and the environment. Due to the lack of awareness of both aspects, the Earth's temperature is getting warmer over the past few years and the long-term effect of such trend is that the sea level has started to rise. Coastal countries start to witness its impacts and some of them have already taken several actions to address this problem. Among the few countries that are determined to take serious measures to address this issue is Denmark. Through its Ministry of Foreign Affairs, Denmark has worked in cooperation/ collaboration with countries that have contributed to this environmental problem in slowing down the phase of global warming by looking directly at its source. In response to this situation, back in November 2017, Denmark's Prime Minister Lars Løkke Rasmussen visited Jakarta to discuss issues of Denmark's interest in Indonesia, especially about environmental issue in Indonesia. The meeting was marked by a commitment of strengthened relations between two countries, and an exchange of gifts between both leaders. This study aims to find out the reasons why Denmark wanted to cooperate with Indonesia in surmounting environmental problems, and what actions the Danish government has taken to decrease the rate of pollution in Indonesia through the adoption of the National Interest concept. Towards the end, this article shows that Denmark has built several green facilities in order to decrease the pollution level, which partially comes from Indonesia.

Keywords: Indonesia-Denmark; green diplomacy; cooperation.

Septyanto Galan Prakoso, Nadia Dian Ardita, Andriyansyah Perdana Murtyantoro

Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)

Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep *National Interest*. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia-Denmark; diplomasi hijau; kerja sama.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aji Widiatmaja, Ulul Albab

Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamic

Indonesia's foreign policy in the Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) and Joko Widodo's era have their own strengths and weaknesses. SBY's foreign policy tended to be outward-looking, which was marked by promotion of soft power, high politics, and leveraging Indonesia influence in global stage. Meanwhile, Joko Widodo's foreign policy is more inward-looking in that it focuses more on domestic sectors. Problems will arise if a country carries out its foreign policy in an unbalanced manner. Development in the global and regional strategic environment requires a collective response achieved in multilateral forums. This makes cooperation and active participation of a country in international forums become important. This paper aims to analyze Indonesia's foreign policy under SBY and Joko Widodo to find out the strengths and weaknesses of both foreign policies. The author has also provided a foreign policy recommendation that combines both inward and outward-looking perspectives in its performance. They are made in the form of reclaiming Indonesia's leadership in ASEAN to make the region a zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), preventing foreign powers infiltration, maintaining ASEAN countries sovereignty, and curbing pragmatic and unilateralist actions in response to strategic environmental dynamics. These are important to ensure the achievement of Indonesia's national interests. In simple terms, outward-looking policies are adopted as a tool to achieve national interests that benefit the Indonesian people (inward-looking).

Keywords: Foreign policy; inward looking; outward looking; Indonesia leadership; National interest.

Aji Widiatmaja, Ulul Albab

Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics* serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-forum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN)*, mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*).

Kata Kunci: kebijakan luar negeri; *inward looking*; *outward looking*; kepemimpinan Indonesia; kepentingan nasional.